

Terpilihnya Zohran Kwame Mamdani Muslim Pertama sebagai Walikota New York

Rakha Pratama Putra¹, Nazwa Anindita Putri², Putri Ramadhani Bugis³

Hendra Maujana Saragih⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional

¹rakhapratama156@gmail.com

²nazwaanindita1@gmail.com

³putriramadhanibugis@gmail.com

⁴hendramaujanasaragih@civitas.unas.ac.id

Abstrak

Terpilihnya Zohran Kwame Mamdani sebagai Wali Kota New York merupakan fenomena politik kontemporer yang penting dalam kajian hubungan internasional, khususnya dalam konteks kota global. New York sebagai pusat keuangan dunia, migrasi internasional, dan institusi global menjadikan dinamika politik lokalnya memiliki implikasi internasional yang luas. Paper ini membahas fenomena tersebut dengan menempatkannya dalam kerangka hubungan antara politik lokal dan struktur ekonomi global. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kemenangan Mamdani dapat dipahami sebagai respons politik lokal terhadap tekanan struktural ekonomi global neoliberal, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi peran kota global sebagai aktor sub-negara dalam sistem internasional. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori Ekonomi Politik Internasional, teori neoliberalisme, konsep kota global, dan pendekatan aktor sub-negara dalam Politik Internasional. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap buku akademik, jurnal ilmiah, serta dokumen yang relevan. Temuan utama menunjukkan bahwa kemenangan Mamdani merepresentasikan resistensi terhadap ketimpangan ekonomi global, menguatnya politik progresif di ruang urban, serta meningkatnya kapasitas kota global sebagai agen normatif dalam politik internasional. Kesimpulannya, perubahan politik di tingkat kota global memiliki implikasi signifikan terhadap dinamika ekonomi dan politik internasional kontemporer.

Kata Kunci: *Zohran Mamdani, Ekonomi Politik Internasional, Kota Global*

Abstract

The election of Zohran Kwame Mamdani as Mayor of New York City is an important contemporary political phenomenon in the study of international relations, especially in the context of global cities. New York as a center of world finance, international migration, and global institutions makes its local political dynamics have far-reaching international implications. This paper discusses this phenomenon by placing it within the framework of the relationship between local politics and global economic structures. The main problem in this study is how Mamdani's victory can be understood as a local political response to the structural pressures of the neoliberal global economy, as well as how it affects the role of global cities as sub-state actors in the international system. To answer these problems, this study uses the theoretical framework of International Political Economy, neoliberalism theory, the concept of global cities, and the approach of sub-state actors in International Politics. The methodology used is a qualitative approach through literature studies of academic books, scientific journals, and relevant documents. Key findings show that Mamdani's victory represents resistance to global economic inequality, the strengthening of progressive politics in urban spaces, and the increasing capacity of global cities as normative agents in international politics. In conclusion, political changes at the global city level have significant implications for contemporary international economic and political dynamics.

Keywords: *Zohran Mamdani, International Political Economy, Global Cities*

PENDAHULUAN

Perkembangan studi hubungan internasional menunjukkan bahwa aktor dalam sistem internasional tidak lagi terbatas pada negara-bangsa semata. Globalisasi telah memperluas peran aktor non-negara dan sub-negara, termasuk kota-kota besar yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik lintas batas. Kota global menjadi arena utama di mana interaksi antara politik domestik dan struktur global berlangsung secara intens (Keohane & Nye, 2012). New York merupakan salah satu kota global terpenting dalam sistem internasional. Kota ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat keuangan global, tetapi juga sebagai pusat migrasi internasional, kebudayaan global, dan lokasi berbagai institusi internasional. Oleh karena itu, dinamika politik lokal di New York memiliki implikasi yang melampaui batas nasional (Sassen, 2001).

Perkembangan studi hubungan internasional menunjukkan bahwa aktor dalam sistem internasional tidak lagi terbatas pada negara-bangsa semata. Globalisasi telah memperluas peran aktor non-negara dan sub-negara, termasuk kota-kota besar yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik lintas batas. Kota global menjadi arena utama di mana interaksi antara politik domestik dan struktur global berlangsung secara intens (Harvey, 2005; Piketty, 2014). New York merupakan salah satu kota global terpenting dalam sistem internasional. Kota ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat keuangan global, tetapi juga sebagai pusat migrasi internasional, kebudayaan global, dan lokasi berbagai institusi internasional. Oleh karena itu, dinamika politik lokal di New York memiliki implikasi yang melampaui batas nasional (Harvey D. , 2005).

Terpilihnya Zohran Kwame Mamdani sebagai Wali Kota New York (dalam kerangka analitis paper ini) menjadi menarik karena orientasi politiknya yang progresif dan kritis terhadap kapitalisme neoliberal. Mamdani dikenal memperjuangkan keadilan sosial, regulasi pasar perumahan, dan perlindungan kelas pekerja. Kemenangan ini menunjukkan adanya perubahan preferensi politik masyarakat urban yang semakin terdampak oleh ketimpangan global (Harvey D. , 2005). Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam paper ini adalah: Bagaimana terpilihnya Zohran Kwame Mamdani sebagai Wali Kota New York dapat dianalisis dari perspektif Ekonomi Politik Internasional dan Politik Internasional? Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan keterkaitan antara politik lokal di kota global dengan dinamika ekonomi dan politik internasional (Gilpin, 2001).

Globalisasi telah mengubah struktur sistem internasional secara mendasar. Aktor dalam hubungan internasional tidak lagi terbatas pada negara-bangsa, melainkan mencakup aktor non-negara dan sub-negara seperti kota global. Proses globalisasi telah memperluas interaksi lintas batas yang melibatkan arus modal, tenaga kerja, dan ide secara intensif (Keohane & Nye, 2012). Kota global menjadi ruang strategis di mana kepentingan ekonomi global bertemu dengan realitas sosial masyarakat lokal. Dalam konteks ini, kebijakan politik di tingkat kota sering kali

berada di bawah tekanan pasar global dan kepentingan modal internasional. Kondisi tersebut menjadikan kota sebagai arena utama kontradiksi kapitalisme global (Harvey D. , 2005). New York merupakan salah satu kota global terpenting dalam sistem internasional. Kota ini berfungsi sebagai pusat keuangan dunia, pusat migrasi internasional, dan lokasi berbagai institusi internasional. Oleh karena itu, dinamika politik lokal New York memiliki signifikansi internasional yang kuat (Sassen, 2001).

Terpilihnya Zohran Kwame Mamdani sebagai Wali Kota New York mencerminkan perubahan preferensi politik masyarakat urban yang semakin kritis terhadap ketimpangan ekonomi dan krisis sosial perkotaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya menghasilkan integrasi ekonomi, tetapi juga memunculkan resistensi politik terhadap struktur ekonomi global yang dominan (Piketty, 2014).

Ekonomi Politik Internasional (EPI) merupakan bidang kajian yang membahas hubungan timbal balik antara kekuasaan politik dan struktur ekonomi dalam skala global. Dalam perspektif ini, ekonomi internasional tidak dipandang sebagai arena yang netral, melainkan sebagai ruang yang dibentuk oleh relasi kekuasaan antaraktor politik dan ekonomi. Robert Gilpin menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun lokal, sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi internasional yang sedang dominan.⁷ Dalam tradisi EPI kritis, neoliberalisme dipahami sebagai ideologi ekonomi-politik yang menekankan deregulasi pasar, privatisasi, liberalisasi perdagangan, serta pengurangan peran negara dalam penyediaan kesejahteraan sosial. Ideologi ini menjadi paradigma dominan dalam ekonomi global sejak akhir Perang Dingin. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa neoliberalisme sering kali menghasilkan ketimpangan sosial dan ekonomi, khususnya di kota-kota besar yang terintegrasi secara intensif ke dalam pasar global (Piketty, 2014).

Ekonomi Politik Internasional mempelajari hubungan timbal balik antara kekuasaan politik dan struktur ekonomi dalam sistem global. Perspektif ini

menekankan bahwa kebijakan ekonomi tidak pernah netral, melainkan selalu mencerminkan relasi kekuasaan antara aktor politik dan ekonomi (Sassen, 2001). Robert Gilpin menegaskan bahwa struktur ekonomi internasional membatasi sekaligus membentuk pilihan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal (Keating, 1999). Kota global merupakan konsep penting dalam memahami bagaimana struktur ekonomi internasional beroperasi di tingkat lokal. Saskia Sassen menjelaskan bahwa kota global adalah ruang strategis tempat terkonsentrasinya modal internasional, tenaga kerja global, dan institusi keuangan dunia. Kota global menjadi titik temu antara kepentingan modal global dan kehidupan sosial masyarakat lokal, sehingga kontradiksi kapitalisme global paling terasa di wilayah ini.

Selain itu, dalam kajian politik internasional kontemporer, peran aktor sub-negara semakin mendapat perhatian. Pemerintah kota tidak lagi dipandang sebagai aktor pasif, melainkan sebagai entitas politik yang mampu melakukan hubungan lintas batas melalui praktik paradiplomasi. Kota dapat membangun jaringan internasional, mempromosikan nilai-nilai tertentu, serta terlibat dalam isu global seperti perubahan iklim, migrasi, dan hak asasi manusia (Keating, 1999). Dengan menggunakan kerangka EPI dan politik internasional ini, terpilihnya Zohran Kwame Mamdani sebagai Wali Kota New York dapat dianalisis sebagai fenomena yang berada di persimpangan antara dinamika ekonomi global, politik lokal, dan perubahan struktur aktor dalam sistem internasional (Gilpin, 2001).

Neoliberalisme sebagai ideologi dominan dalam ekonomi global menekankan deregulasi pasar, privatisasi, dan liberalisasi ekonomi. Di kota global, neoliberalisme tercermin dalam dominasi sektor keuangan, liberalisasi pasar properti, dan komersialisasi ruang publik. Proses ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperdalam ketimpangan sosial (Gilpin, 2001).

Dalam politik internasional kontemporer, pemerintah kota semakin diakui sebagai aktor sub-negara yang aktif. Melalui jaringan kota global dan praktik

paradiplomasi, kota dapat mempromosikan norma-norma alternatif dalam isu global seperti keadilan sosial, migrasi, dan perubahan iklim (Sassen, 2001).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari buku akademik, jurnal ilmiah, dan literatur teoretis yang relevan dengan Ekonomi Politik Internasional dan Politik Internasional. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah analisis konseptual dan teoretis, bukan pengukuran empiris (Creswell & Creswell, 2018). Analisis dilakukan dengan mengaitkan konsep dan teori EPI serta politik internasional dengan fenomena politik lokal yang dijadikan sebagai studi kasus analitis. Validitas penelitian didasarkan pada konsistensi logika argumentasi dan relevansi teori yang digunakan (Fadli, 2021).

PEMBAHASAN

Sebagai salah satu kota global terpenting di dunia, New York menempati posisi strategis dalam sistem ekonomi internasional. Kota ini merupakan pusat keuangan global, lokasi berbagai perusahaan multinasional, serta simpul utama arus modal dan tenaga kerja internasional. Dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional, posisi ini menjadikan New York sebagai ruang utama beroperasinya kapitalisme global (Sassen, 2001). Namun, integrasi New York ke dalam ekonomi global tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memunculkan berbagai masalah struktural. Tingginya harga properti, krisis perumahan, meningkatnya biaya hidup, serta ketimpangan pendapatan merupakan konsekuensi langsung dari dominasi modal global di tingkat kota. Kondisi ini mencerminkan kontradiksi utama neoliberalisme, di mana pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan (Piketty, 2014).

Terpilihnya Zohran Kwame Mamdani sebagai Wali Kota New York dapat dipahami sebagai respons politik terhadap kondisi tersebut. Agenda kebijakan Mamdani yang menekankan regulasi pasar perumahan, perluasan layanan publik, dan perlindungan kelas pekerja menunjukkan upaya untuk mengembalikan peran pemerintah kota dalam mengoreksi kegagalan pasar. Dalam perspektif EPI,

kebijakan ini dapat dipandang sebagai bentuk resistensi terhadap struktur ekonomi global neoliberal (Harvey D. , 2005). Kemenangan Mamdani juga menunjukkan bahwa globalisasi tidak sepenuhnya menghilangkan ruang bagi politik lokal. Meskipun kota global sangat terintegrasi ke dalam sistem ekonomi internasional, masyarakat lokal tetap memiliki kapasitas untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui mekanisme demokrasi. Hal ini menegaskan bahwa globalisasi merupakan proses yang bersifat politis dan selalu terbuka terhadap kontestasi (Scholte, 2005).

Selain dimensi ekonomi, latar belakang Mamdani sebagai anak imigran memiliki makna penting dalam konteks politik internasional. Migrasi internasional merupakan fenomena global yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi antarnegara, konflik, dan dinamika pasar tenaga kerja global. Kota global seperti New York menjadi ruang utama integrasi komunitas imigran dan pembentukan identitas transnasional. Kepemimpinan Mamdani mencerminkan karakter inklusif kota global dan menantang narasi nasionalisme eksklusif (Castles & Miller, 1998). Dari perspektif politik internasional, kepemimpinan Mamdani juga memperkuat peran New York sebagai aktor sub-negara dalam sistem internasional. Melalui kebijakan progresif dan keterlibatan dalam jaringan kota global, New York berpotensi mempromosikan norma-norma alternatif yang berbeda dari agenda neoliberal dominan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan dalam politik global tidak hanya terjadi di tingkat negara, tetapi juga di tingkat kota global (Acuto, 2013; Keating, 1999).

Profil Zohran Kwame Mamdani

Zohran Kwame Mamdani merupakan seorang politisi progresif Amerika Serikat yang dikenal sebagai anggota New York State Assembly dari Partai Demokrat. Ia lahir di Kampala, Uganda, dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga imigran sebelum menetap di New York. Latar belakang sosial dan pengalaman hidupnya sebagai bagian dari komunitas imigran sangat memengaruhi pandangan politiknya, terutama dalam isu keadilan sosial, perumahan, dan hak-hak kelompok marjinal (Setya, 2025). Secara ideologis, Mamdani berafiliasi dengan arus progresif

kiri dalam politik Amerika Serikat dan dikenal sebagai anggota *Democratic Socialists of America* (DSA). Orientasi politik ini menempatkannya dalam posisi yang kritis terhadap kapitalisme neoliberal dan dominasi korporasi besar dalam perekonomian, khususnya di kota-kota global seperti New York (Harvey D. , 2005).

Aktivitas Politik Zohran Mamdani

Dalam aktivitas politiknya, Mamdani dikenal aktif memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kelas pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai anggota legislatif negara bagian, ia terlibat dalam advokasi kebijakan seperti pengendalian harga sewa, perluasan perumahan publik, peningkatan upah minimum, serta penghapusan kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap komunitas imigran. Aktivitas ini menempatkannya sebagai representasi politik urban progresif (Stiglitz, 2013).

Mamdani juga aktif membangun basis politik melalui gerakan akar rumput (*grassroots movement*), dengan melibatkan komunitas lokal, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan politiknya tidak semata-mata bertumpu pada elite partai, melainkan pada mobilisasi sosial di tingkat lokal. Dalam perspektif politik internasional, hal ini mencerminkan bagaimana dinamika global dapat diterjemahkan ke dalam praktik politik lokal (Scholte, 2005).

Isi dan Arah Kampanye Politik

Isi kampanye Mamdani berfokus pada isu-isu struktural yang dihadapi masyarakat New York sebagai kota global. Beberapa agenda utama kampanyenya meliputi reformasi kebijakan perumahan, penurunan biaya hidup, peningkatan layanan publik, serta pembatasan pengaruh korporasi besar dalam proses pembuatan kebijakan. Kampanye ini secara eksplisit mengkritik dampak neoliberal global yang dianggap memperburuk ketimpangan sosial di kota (Harvey D. , 2005). Selain isu ekonomi, kampanye Mamdani juga menekankan nilai inklusivitas, keberagaman, dan keadilan bagi komunitas imigran. Narasi kampanye tersebut memperkuat citra New York sebagai kota global yang multikultural dan terbuka. Dalam konteks politik internasional, kampanye ini dapat dipahami sebagai bentuk

perlawanan terhadap tren nasionalisme eksklusif yang berkembang di berbagai negara.

Terpilihnya Zohran Kwame Mamdani sebagai Wali Kota New York

Terpilihnya Zohran Kwame Mamdani sebagai Wali Kota New York City menandai momen penting dalam dinamika politik perkotaan di Amerika Serikat. Kemenangannya mencerminkan konsolidasi kekuatan politik progresif di tingkat kota global, yang selama ini menjadi pusat dominasi kapital finansial internasional. Dalam konteks Ekonomi Politik Internasional, peristiwa ini dapat dipahami sebagai bentuk koreksi politik lokal terhadap dampak struktural globalisasi neoliberal yang semakin dirasakan oleh masyarakat urban (Acuto & Rayner, 2016).

Proses pemilihan ini juga menunjukkan perubahan orientasi pemilih perkotaan yang semakin kritis terhadap kebijakan pro-pasar dan lebih responsif terhadap agenda redistribusi, keadilan sosial, serta perluasan peran negara lokal. Dengan demikian, terpilihnya Mamdani tidak hanya merupakan fenomena elektoral domestik, tetapi juga refleksi dari pergeseran ideologis yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi global, inflasi perkotaan, dan ketimpangan struktural (Brenner, Peck, & Theodore, 2010).

Terpilihnya Zohran Kwame Mamdani sebagai Wali Kota New York merupakan peristiwa politik yang memiliki signifikansi penting dalam dinamika politik perkotaan Amerika Serikat serta dalam konteks politik internasional kontemporer. Sebagai salah satu kota global paling berpengaruh di dunia, New York memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi dan politik internasional. Oleh karena itu, perubahan kepemimpinan politik di tingkat kota tidak dapat dilepaskan dari konteks global yang lebih luas (Sassen, 2001).

Dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional, terpilihnya Mamdani dapat dipahami sebagai manifestasi dari ketegangan antara demokrasi lokal dan struktur ekonomi global neoliberal. Kota global seperti New York menjadi ruang di mana dampak globalisasi paling terasa secara langsung, baik dalam bentuk pertumbuhan ekonomi maupun ketimpangan sosial yang semakin tajam. Ketimpangan ini

menciptakan kondisi sosial-politik yang memungkinkan munculnya alternatif politik progresif (Harvey D. , 2005).

Secara historis, kebijakan politik di New York banyak dipengaruhi oleh kepentingan elite ekonomi, khususnya sektor keuangan dan properti. Dominasi modal global dalam pengelolaan ruang kota telah menyebabkan meningkatnya harga hunian, komersialisasi ruang publik, serta marginalisasi kelompok berpenghasilan rendah. Terpilihnya Mamdani mencerminkan pergeseran preferensi politik masyarakat urban yang semakin menuntut peran aktif pemerintah kota dalam menjamin keadilan sosial (Piketty, 2014).

Latar belakang Mamdani sebagai anak imigran memberikan makna simbolik yang kuat dalam konteks kota global. Migrasi internasional merupakan fenomena global yang berkaitan erat dengan ketimpangan ekonomi antarwilayah dan dinamika pasar tenaga kerja global. Kota global seperti New York menjadi ruang integrasi komunitas imigran sekaligus arena artikulasi identitas transnasional. Kepemimpinan Mamdani mencerminkan karakter multikultural kota global dan menantang narasi nasionalisme eksklusif (Castles & Miller, 1998).

Dari perspektif politik internasional, terpilihnya Mamdani memperkuat argumen bahwa aktor sub-negara semakin memainkan peran penting dalam sistem internasional. Pemerintah kota tidak lagi sekadar pelaksana kebijakan nasional, melainkan aktor politik yang memiliki kapasitas normatif untuk memengaruhi agenda global melalui kebijakan lokal (Acuto, *Global Cities, Governance and Diplomacy*, 2013).

Dengan demikian, terpilihnya Zohran Kwame Mamdani tidak dapat dipahami hanya sebagai hasil kontestasi elektoral domestik, tetapi sebagai bagian dari dinamika global yang mencerminkan krisis legitimasi neoliberalisme dan munculnya alternatif politik di tingkat kota global (Rodrik, 2011).

Kemenangan Zohran Mamdani dan Makna Politik Global

Kemenangan Mamdani memiliki makna simbolik dan substantif dalam politik internasional. Secara simbolik, keberhasilannya memperlihatkan bahwa narasi alternatif terhadap neoliberalisme masih memiliki daya tarik politik, bahkan di pusat kapitalisme global seperti New York. Secara substantif, kemenangan ini membuka ruang bagi eksperimen kebijakan progresif di tingkat kota yang berpotensi menantang logika pasar bebas global (Harvey D., 2005). Dari perspektif politik internasional, kemenangan ini juga menegaskan meningkatnya peran aktor sub-negara sebagai agen normatif. Pemerintah kota, melalui kepemimpinan progresif, dapat mempromosikan nilai keadilan sosial, inklusivitas, dan regulasi ekonomi sebagai norma tandingan terhadap hegemoni kebijakan neoliberal global (Peck, Theodore, & Brenner, 2013).

Kemenangan Zohran Kwame Mamdani dalam pemilihan Wali Kota New York memiliki makna politik yang melampaui hasil elektoral semata. Kemenangan ini merepresentasikan perubahan struktural dalam politik urban, di mana politik progresif mulai memperoleh legitimasi yang lebih luas di tengah krisis ekonomi dan sosial yang dihasilkan oleh globalisasi neoliberal (Brenner, Peck, & Theodore, 2010). Dalam kerangka Ekonomi Politik Internasional, kemenangan Mamdani dapat dipahami sebagai bentuk koreksi politik terhadap kegagalan pasar global dalam menjamin kesejahteraan sosial. Dominasi neoliberalisme selama beberapa dekade telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan memperdalam ketimpangan sosial, khususnya di kota-kota global. Kondisi ini menciptakan basis sosial bagi munculnya resistensi politik di tingkat lokal (Stiglitz, 2013).

Kemenangan Mamdani juga menunjukkan bahwa kota global tetap menjadi ruang demokrasi yang dinamis. Meskipun sangat terintegrasi ke dalam ekonomi global, masyarakat kota tetap memiliki kapasitas untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui mekanisme elektoral. Hal ini menantang pandangan deterministik yang melihat globalisasi sebagai proses yang sepenuhnya menghilangkan otonomi politik lokal (Scholte, 2005). Dari perspektif politik

internasional, kemenangan Mamdani memperkuat peran kota global sebagai agen normatif. Pemerintah kota memiliki potensi untuk mempromosikan nilai-nilai alternatif seperti keadilan sosial, regulasi ekonomi, dan inklusivitas sebagai norma tandingan terhadap hegemoni neoliberal. Dalam jaringan kota global, kebijakan progresif di satu kota dapat menjadi referensi bagi kota lain di berbagai negara (Acuto & Rayner, 2016).

Namun, kemenangan politik tidak secara otomatis menjamin keberhasilan implementasi kebijakan. Pemerintahan Mamdani menghadapi berbagai tantangan struktural, termasuk tekanan investor internasional, pasar keuangan global, serta batasan institusional dalam sistem federal Amerika Serikat. Dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional, kondisi ini mencerminkan kontradiksi antara demokrasi lokal dan kapitalisme global (Jessop, 2002). Meskipun demikian, kemenangan Mamdani tetap memiliki signifikansi simbolik yang kuat. Ia menunjukkan bahwa alternatif politik terhadap neoliberalisme bukan hanya wacana akademik, tetapi memiliki daya tarik elektoral yang nyata. Kemenangan ini membuka ruang bagi eksperimen kebijakan progresif di kota global dan memperluas imajinasi politik dalam sistem internasional kontemporer (Harvey D. , 2012).

Pelantikan Zohran Mamdani sebagai Wali Kota New York

Pelantikan Zohran Mamdani sebagai Wali Kota New York merupakan fase institusionalisasi dari kemenangan politik progresif tersebut. Pelantikan ini menandai transisi dari politik kampanye menuju praktik pemerintahan kota yang beroperasi dalam struktur ekonomi global yang kompleks. Dalam konteks EPI, fase ini menjadi krusial karena menentukan sejauh mana agenda progresif dapat diimplementasikan di tengah tekanan modal global, investor internasional, dan pasar keuangan (Jessop, 2002). Pelantikan tersebut juga memperkuat posisi New York sebagai aktor sub-negara yang memiliki kapasitas diplomatik dan normatif. Di bawah kepemimpinan Mamdani, New York berpotensi memperluas jejaring kota global progresif yang menekankan isu perumahan, hak pekerja, perubahan iklim, dan keadilan migran sebagai agenda lintas batas (Sassen, 2001).

Pelantikan Zohran Kwame Mamdani sebagai Wali Kota New York merupakan fase penting dalam transisi dari kemenangan elektoral menuju praktik pemerintahan kota. Dalam konteks kota global, pelantikan tidak hanya bersifat administratif dan simbolik, tetapi juga menandai dimulainya proses institusionalisasi agenda politik progresif dalam struktur pemerintahan yang beroperasi di bawah tekanan ekonomi dan politik global.

Sebagai kota global, New York memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem ekonomi internasional, khususnya melalui sektor keuangan, investasi asing, dan jaringan korporasi multinasional. Oleh karena itu, pelantikan Mamdani harus dipahami sebagai momen politik yang berlangsung dalam kerangka Ekonomi Politik Internasional, di mana kepemimpinan lokal berhadapan langsung dengan kepentingan pasar global dan aktor ekonomi transnasional (Sassen, 2001).

Dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional, pelantikan ini menandai awal dari negosiasi antara agenda kebijakan progresif dan struktur ekonomi global yang cenderung neoliberal. Mamdani secara simbolik membawa mandat politik untuk memperkuat peran pemerintah kota dalam regulasi pasar perumahan, perlindungan kelas pekerja, dan perluasan layanan publik. Namun, implementasi agenda tersebut akan berlangsung dalam batasan institusional yang ditentukan oleh pasar global, regulasi negara bagian, dan sistem federal Amerika Serikat (Gilpin, 2001).

Pelantikan Mamdani juga memiliki makna normatif dalam politik internasional. Sebagai wali kota dari salah satu kota paling berpengaruh di dunia, posisi Mamdani memberinya visibilitas internasional yang tinggi. Kepemimpinannya berpotensi membentuk citra New York sebagai kota global yang mengusung nilai keadilan sosial, inklusivitas, dan keberpihakan pada kelompok marjinal. Dalam konteks ini, pelantikan tersebut tidak hanya berdampak pada politik domestik, tetapi juga pada diplomasi kota dan jaringan kota global (Acuto, 2013).

Selain itu, pelantikan Mamdani memperkuat peran kota sebagai aktor sub-negara dalam sistem internasional. Pemerintah kota memiliki kapasitas untuk terlibat dalam kerja sama lintas batas, membangun jejaring internasional, serta mempromosikan agenda kebijakan tertentu dalam forum global. Kepemimpinan progresif di tingkat kota membuka peluang bagi New York untuk menjadi pusat advokasi kebijakan alternatif terhadap neoliberalisme global (Keating, 1999).

Namun demikian, pelantikan Mamdani juga menandai dimulainya tantangan politik yang signifikan. Resistensi dari elite ekonomi, tekanan investor internasional, serta dinamika politik domestik dapat membatasi ruang gerak pemerintahan kota. Dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional, kondisi ini mencerminkan kontradiksi struktural antara demokrasi lokal dan kapitalisme global, di mana mandat politik rakyat sering kali berhadapan dengan kekuatan ekonomi transnasional.

Dengan demikian, pelantikan Zohran Kwame Mamdani sebagai Wali Kota New York tidak hanya merupakan peristiwa formal dalam siklus politik lokal, tetapi juga momen penting dalam dinamika politik global. Pelantikan ini menandai awal dari eksperimen kebijakan progresif di kota global dan menjadi indikator sejauh mana politik lokal mampu menantang atau menegosiasikan struktur ekonomi internasional yang dominan (Rodrik, 2011).

Konteks Globalisasi Neoliberal dan Kota Global

Globalisasi neoliberal merupakan kerangka dominan yang membentuk dinamika ekonomi dan politik global sejak akhir Perang Dingin. Neoliberalisme tidak hanya beroperasi sebagai seperangkat kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai ideologi yang membentuk cara negara dan aktor sub-negara memahami pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial (Harvey D. , 2005). Dalam konteks ini, kota global menjadi ruang utama di mana prinsip-prinsip neoliberalisme diterjemahkan ke dalam praktik kebijakan konkret.

Kota global berfungsi sebagai simpul utama jaringan ekonomi internasional. Di kota-kota seperti New York, London, dan Tokyo, terkonsentrasi lembaga

keuangan internasional, perusahaan multinasional, serta pasar modal global. Konsentrasi ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga menghasilkan polarisasi sosial yang tajam (Sassen, 2001). Pertumbuhan ekonomi di kota global sering kali tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional, kondisi tersebut mencerminkan relasi kekuasaan antara modal global dan otoritas politik lokal. Pemerintah kota sering kali berada dalam posisi dilematis: di satu sisi harus menjaga daya tarik investasi internasional, di sisi lain menghadapi tuntutan masyarakat lokal yang semakin terpinggirkan (Strange, 1996). Ketegangan inilah yang menjadi latar struktural munculnya politik progresif urban. Neoliberalisme juga mengubah fungsi ruang kota. Ruang publik semakin dikomodifikasi, sementara kebijakan perumahan cenderung berpihak pada kepentingan pasar. Spekulasi properti internasional menjadikan hunian sebagai instrumen investasi, bukan sebagai hak sosial. Akibatnya, kelas pekerja dan kelompok berpenghasilan rendah terdorong keluar dari pusat kota (Brenner & Theodore, 2002).

Dalam konteks New York, dinamika ini sangat terlihat. Sebagai pusat keuangan dunia, kota ini menjadi magnet bagi modal internasional. Namun, ketergantungan terhadap sektor keuangan juga membuat ekonomi kota rentan terhadap fluktuasi global. Krisis finansial global 2008 menjadi contoh nyata bagaimana krisis global berdampak langsung pada kehidupan masyarakat urban (Stiglitz, 2013). Terpilihnya Zohran Kwame Mamdani dapat dipahami sebagai respons terhadap kondisi struktural ini. Politik progresif yang diusungnya menantang asumsi dasar neoliberalisme bahwa pasar selalu menjadi mekanisme paling efisien dalam mengatur kehidupan sosial. Dalam hal ini, Mamdani merepresentasikan upaya untuk merebut kembali ruang politik lokal dari dominasi logika pasar global.

Politik Urban, Kelas Sosial, Mobilisasi Pemilih

Politik urban di kota global tidak dapat dilepaskan dari struktur kelas sosial yang terbentuk akibat globalisasi ekonomi. Kota global mempertemukan kelompok elite ekonomi global dengan kelas pekerja lokal dalam ruang geografis yang sama, namun dengan akses sumber daya yang sangat timpang (Piketty, 2014). Ketimpangan ini menciptakan basis sosial bagi munculnya politik alternatif.

Kelas menengah dan kelas pekerja urban semakin menghadapi tekanan ekonomi berupa kenaikan biaya hidup, stagnasi upah, dan ketidakpastian kerja. Dalam konteks ini, politik progresif menawarkan narasi yang menghubungkan pengalaman sehari-hari masyarakat dengan struktur ekonomi global yang lebih luas (Harvey D. , 2012). Zohran Mamdani berhasil membangun narasi politik yang mengartikulasikan ketidakpuasan kelas pekerja terhadap kebijakan pro-pasar. Kampanyenya menekankan bahwa krisis perumahan dan ketimpangan bukanlah masalah individual, melainkan hasil dari struktur ekonomi yang tidak adil (Stiglitz, 2013). Pendekatan ini efektif dalam memobilisasi pemilih urban yang selama ini merasa terpinggirkan.

Mobilisasi politik Mamdani juga menunjukkan pentingnya gerakan akar rumput dalam politik kota global. Berbeda dengan politik elite yang bergantung pada pendanaan besar, politik progresif urban sering kali bertumpu pada jaringan komunitas, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam perspektif politik internasional, fenomena ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap globalisasi neoliberal dapat berakar pada tingkat lokal.

Selain itu, politik identitas juga memainkan peran penting. Latar belakang Mamdani sebagai anak imigran memperkuat resonansi politiknya di kalangan komunitas migran. Migrasi internasional merupakan fenomena global yang berdampak langsung pada struktur sosial kota global (Castles & Miller, 1998). Kepemimpinan Mamdani merepresentasikan integrasi politik komunitas migran dalam ruang demokrasi lokal.

Implikasi Internasional dari Kebijakan Kota

Kebijakan pemerintah kota global memiliki implikasi internasional yang semakin signifikan. Dalam konteks ini, kemenangan Mamdani membuka kemungkinan bagi New York untuk mempromosikan agenda kebijakan alternatif dalam jaringan kota global (Acuto, 2013). Kota tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan nasional, tetapi juga produsen norma politik internasional. Paradiplomasi kota memungkinkan pemerintah lokal untuk terlibat langsung dalam isu global seperti perubahan iklim, hak migran, dan keadilan sosial. Di bawah kepemimpinan progresif, kebijakan kota dapat menjadi referensi bagi kota lain di berbagai negara. Fenomena ini menunjukkan desentralisasi otoritas dalam sistem internasional.

Namun, ruang gerak pemerintah kota tetap dibatasi oleh struktur ekonomi global. Tekanan investor internasional dan pasar keuangan dapat membatasi implementasi kebijakan progresif. Dalam perspektif EPI, hal ini mencerminkan ketegangan antara demokrasi lokal dan kapitalisme global (Jessop, 2002). Terpilihnya Mamdani menjadi studi kasus penting untuk memahami sejauh mana kota global dapat menantang struktur ekonomi internasional. Keberhasilan atau kegagalan kebijakan progresif di New York akan memiliki resonansi global, terutama bagi gerakan politik urban di kota-kota lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari perspektif Ekonomi Politik Internasional dan Politik Internasional, terpilihnya Zohran Kwame Mamdani sebagai Wali Kota New York merupakan manifestasi dari dinamika global yang terartikulasikan dalam politik lokal. Kemenangan dan pelantikannya mencerminkan respons masyarakat kota global terhadap tekanan struktural neoliberalisme, khususnya ketimpangan ekonomi dan krisis sosial perkotaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kota global tidak hanya menjadi objek dari proses globalisasi, tetapi juga subjek politik yang aktif. Melalui kepemimpinan progresif, kota seperti New York dapat berfungsi sebagai arena kontestasi ideologis dan laboratorium kebijakan alternatif dalam sistem internasional. Dengan

demikian, perubahan politik di tingkat kota memiliki implikasi yang signifikan bagi pemahaman hubungan antara ekonomi global, politik lokal, dan transformasi aktor dalam politik internasional kontemporer.

Terpilihnya Zohran Kwame Mamdani sebagai Wali Kota New York merupakan manifestasi dari perubahan struktural dalam politik global kontemporer. Fenomena ini menunjukkan bahwa globalisasi neoliberal tidak menghapus ruang politik lokal, melainkan justru menciptakan kondisi bagi munculnya resistensi politik urban.

Penelitian ini menegaskan bahwa kota global harus dipahami sebagai aktor politik yang aktif dalam sistem internasional. Perubahan kepemimpinan di tingkat kota dapat menghasilkan implikasi normatif dan kebijakan yang melampaui batas nasional. Dengan demikian, kajian hubungan internasional perlu semakin memberi perhatian pada dinamika politik sub-negara.

Dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional, kasus Mamdani memperlihatkan kontradiksi mendasar antara demokrasi lokal dan kapitalisme global. Ketegangan ini tidak dapat diselesaikan sepenuhnya, namun dapat dikelola melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Acuto, M. (2013). *Global Cities, Governance and Diplomacy*. London: Routledge.
- Acuto, M., & Rayner, S. (2016). City Networks: Breaking Gridlocks or Forging (New) Lock-ins? *International Affairs*, 92(5), 1147 - 1166.
- Brenner, N., & Theodore, N. (2002). Cities and the Geographies of “Actually Existing Neoliberalism”. *Antipode*. doi:<https://doi.org/10.1111/1467-8330.00246>
- Brenner, N., Peck, J., & Theodore, N. (2010). Variegated Neoliberalization: Geographies, Modalities, Pathways. *Global Networks*, 10(2), 182–222.
- Castles, S., & Miller, M. J. (1998). *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World* (2 uppl.). London: Macmillan Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (5 uppl.). London: Sage Publications.

- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54. doi:<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gilpin, R. (2001). *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*. New Jersey: Princeton University Press.
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Harvey, D. (2012). *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*. London: Verso.
- Jessop, B. (2002). *The Future of the Capitalist State*. Cambridge: Polity Press.
- Keating, M. (1999). Regions and International Affairs: Motives, Opportunities and Strategies. *Regional & Federal Issues*, 9(1). doi:<https://doi.org/10.1080/13597569908421068>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power and interdependence*. Boston: Longman.
- Peck, J., Theodore, N., & Brenner, N. (2013). Neoliberal Urbanism Redux? *International Journal of Urban and Regional Research*. doi:<https://doi.org/10.1111/1468-2427.12066>
- Piketty, T. (2014). *Capital in The Twenty-First Century*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Rodrik, D. (2011). The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. *Asean Economic Bulletin*, 28(3). doi:10.1355/ae28-3k
- Sassen, S. (2001). *The Global City: New York, London, Tokyo*. New Jersey: Princeton University Press.
- Scholte, J. A. (2005). *Globalization: A Critical Introduction* (2 uppl.). Palgrave Macmillan: New York.
- Setya, D. (den 5 November 2025). *Profil Zohran Mamdani, Wali Kota Muslim Pertama New York*. Hämtat från Detik Jabar: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8195525/profil-zohran-mamdani-wali-kota-muslim-pertama-new-york>
- Stiglitz, J. E. (2013). *The Price of Inequality*. New York: W.W Norton & Company, Inc.
- Strange, S. (1996). *The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.